

## DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(Studi Kasus Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Unit Satuan Kerja di Provinsi Lampung)

Reva Meiliana<sup>1\*)</sup>, Dian Mustika<sup>2)</sup>, Rizki Saputra<sup>3)</sup>

email: [reva.meiliana@darmajaya.ac.id](mailto:reva.meiliana@darmajaya.ac.id), [dian@darmajaya.ac.id](mailto:dian@darmajaya.ac.id),  
[rizkisaputra.1912120023@mail.darmajaya.ac.id](mailto:rizkisaputra.1912120023@mail.darmajaya.ac.id)

<sup>1), 2), 3)</sup> Akuntansi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Jl. ZA. Pagar Alam No. 93, Gedung Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung - 35141

### Abstract

*This study aims to empirically prove about the effect of regulatory compliance, budget goals clarity, and accounting control system on the performance accountability of government agencies. The sample in this study are functional officials involved in managing the accountability of government performance agencies in the Administrative Section of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia Work Unit in Lampung Province. The sampling technique in this study was purposive sampling. The analytical method used in this study is multiple linear regression using the SPSS Version 25 analysis tool. The results of this study indicate that regulatory compliance, budget goals clarity, and accounting control system had an effect on performance accountability of government agencies in the Ministry of Industry Republic of Indonesia Work Unit in Lampung Province.*

**Keywords:** Regulatory Compliance, Budget Goals Clarity, Accounting Control System, Performance Accountability

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kepatuhan regulasi, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel dalam penelitian ini adalah pejabat fungsional yang terlibat dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Bagian Tata Usaha Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Provinsi Lampung. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Provinsi Lampung.

**Kata kunci:** Kepatuhan Regulasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas Kinerja

### 1. Pendahuluan

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggung jawabkan segala kegiatannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang

mempunyai hak dan wewenang untuk meminta, menyajikan, menginformasikan, dan menyebarluaskan akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi

dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya [1]

Pemerintah sebagai poros pengendalian negara memiliki peran yang sangat penting dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian yang tidak dapat ditinggalkan karena memiliki pengaruh langsung dengan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai maksud dan target yang sudah ditetapkan organisasi tersebut melalui media secara berkala [2]. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yaitu dengan mempersiapkan, menyusun, serta menyajikan informasi kinerja secara tertulis, berkala, serta melembaga. Semua pengungkapan tersebut dicantumkan di dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) [3].

Berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP pada Satker Kementerian Perindustrian Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2021, ditemukan bahwa salah satu Satker di Provinsi Lampung memiliki hasil penilaian dengan predikat "CC" dalam penilaian SAKIP tahun 2020, dan predikat "A" dalam penilaian SAKIP tahun 2021. Dari hasil predikat yang diperoleh dari unit Satker Kementerian Perindustrian di Provinsi Lampung yang sangat berbeda secara signifikan, sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam terkait dengan adanya perubahan signifikan tersebut.

Menurut [4], agar terwujudnya akuntabilitas pada sektor publik maka perlu kejelasan atas tujuan sasaran anggaran. Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik [5], apabila sasaran anggaran suatu organisasi jelas maka tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dapat dipersiapkan secara memadai. Selain itu, banyaknya tuntutan publik terhadap organisasi sektor publik agar menjalankan aktivitasnya dengan menjaga kualitas, profesionalisme dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, dalam akuntabilitas diperlukan

adanya pengawasan terhadap organisasi sektor publik tersebut.

Sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme kontrol keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan para manajer dan karyawan di suatu organisasi. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala instansi membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien [6]. Sistem pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan instansi dan reliabilitas data keuangan, sehingga pelaksanaan kinerja keuangan dapat berjalan dengan baik guna memudahkan proses pengambilan keputusan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu ([7]; [6]; [4]; [3]; [2]) dengan menggunakan 3 (tiga) faktor hasil mengkolaborasi penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepatuhan regulasi, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pada Kementerian Perindustrian provinsi Lampung.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

### *Teori Keagenan dan Akuntabilitas Kinerja*

*Agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. *Agency Theory* menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* [8]. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi

sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat.

Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen LAKIP.

### **Pengembangan Hipotesis**

*Kepatuhan Regulasi dan Akuntabilitas Kinerja*  
Ketaatan pemerintah daerah untuk menyampaikan kinerjanya kepada publik merupakan bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan memperhatikan sistem anggaran pemerintah saat membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat terwujud dengan baik jika pemerintah taat pada peraturan perundang-undangan yang berkaku [8], peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan mengikat sehingga instansi pemerintah dapat terhindar dari *fraud* dan fokus pada pencapaian kinerja. Hasil penelitian terdahulu ([6]; [9]; [10]) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

H<sub>1</sub>: Kepatuhan Regulasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja

*Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja*

Anggaran yang telah ditetapkan dalam instansi pemerintah harus dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga dalam melakukan perencanaan instansi harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Menurut [5], kejelasan sasaran anggaran merupakan cerminan dari sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu [7]; [4]; [2]; [11]) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

H<sub>2</sub>: Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja

*Sistem Pengendalian Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja*

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala instansi membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien [11], dengan diterapkannya sistem pengendalian akuntansi yang efektif, efisien, dan ekonomis akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik [12]. Hasil penelitian [13] menunjukkan bahwa adanya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dapat berpengaruh terhadap kelemahan pelaporan keuangan sehingga membuka peluang terjadinya *fraud*. Hasil penelitian terdahulu (

[1]; [2]; [6]; [14]) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

H<sub>3</sub>: Sistem Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan paradigma positivistik yang mengutamakan hubungan kausalitas antar variabel, untuk menjelaskan hubungan antara variabel serta pengaruhnya terhadap suatu variabel lainnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria adalah pejabat fungsional Kementerian Perindustrian Prov. Lampung yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan masa kerja >1 Tahun. Dalam penelitian ini digunakan data primer dengan menggunakan metode survei berupa kuesioner yang disebarakan secara langsung yang berisikan persepsi responden terhadap pertanyaan terkait variabel yang berkaitan dengan persepsi pejabat fungsional Kementerian Perindustrian Prov. Lampung mengenai Akuntabilitas Kinerja. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan skala Likert dengan menggunakan indikator yang berbeda-beda.

Penelitian ini menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) sebagai alat analisis multivariat. Alat analisis model persamaan struktural berbasis varian yang secara bersama-sama mampu melakukan pengujian model pengukuran (*outer model*) maupun model struktural (*inner model*) [15]. Model pengukuran dalam model persamaan struktural menunjukkan hubungan antara konstruk independen dengan konstruk dependen, model ini juga menunjukkan hubungan antara indikator dengan konstruk. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Warp-PLS 7.0 untuk menjelaskan hubungan antar konstruk linier dan non-linier yang diestimasi dengan melihat *Scatter Plots* dan dapat menjelaskan *output indirect effect*, *total effect*, *average variance extracted*, dan

*composite reliability* tanpa harus untuk menghitung manual [16].

### 4. Pembahasan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara offline dengan kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada pejabat fungsional Kementerian Perindustrian Prov. Lampung yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan masa kerja >1 Tahun. Penyebaran kuesioner dilakukan sejak 2 Januari 2023 – 18 Januari 2023. Didapatkan 79 eksemplar kuesioner yang dikembalikan, akan tetapi hanya 36 eksemplar kuesioner yang dapat diolah dikarenakan hasil analisis *outlier* dan *missing value* tidak memenuhi syarat dari PLS-SEM.

#### 4.1. Evaluasi Outer Model

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas yang dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama uji validitas konvergen dan tahap kedua uji validitas diskriminan. Kriteria uji validitas konvergen dikatakan valid jika nilai indikator *loading factor* > 0,70 dan semua konstruk memiliki nilai *average variance extract* (AVE) > 0,50 [17]. Pada penelitian ini seluruh indikator memiliki *cross-loadings factor* > 0,70, dan seluruh nilai AVE tiap variabel > 0,50 yang dapat terlihat pada Tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji validitas konvergen adalah valid.

**Tabel 1.** Nilai AVE untuk Setiap Konstruk

	AKPK	KRPK	KAPK	SPAK
AVE	0.839	0.724	0.761	0.753

Selanjutnya untuk pengujian validitas tahap kedua adalah validitas diskriminan, suatu variabel dikatakan sesuai jika indikator variabel memiliki nilai *loading* paling tinggi pada kelompok variabelnya sendiri [17]. Hasil uji diskriminan validitas dapat dilihat pada Tabel 3. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji validitas diskriminan adalah valid.

**Tabel 2.** Validitas Diskriminan

	AKPK	KRPK	KAPK	SPAK
AKPK	<b>0.731</b>			
KRPK	0.398	<b>0.916</b>		
KAPK	0.293	0.453	<b>0.797</b>	
SPAK	0.594	0.480	0.365	<b>0.780</b>

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menilai reliabilitas pada konstruk reflektif dengan menggunakan hasil dari nilai *Cronbach's Alpha* dan nilai *composite reliability*  $\geq 0,70$  [17]. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.

**Table 3.** Reliability Parameter Value

Indicator	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
AKPK	0.72	0.80
KRPK	0.81	0.87
KAPK	0.86	0.90
SPAK	0.82	0.87

**4.2. Analisis Model Struktural - Uji Hipotesis**  
 Hasil dari analisis pengaruh Kepatuhan Regulasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja menunjukkan nilai koefisien determinasi atau  $R^2$  sebesar 0,889, dari hasil tersebut berarti seluruh variabel bebas (kepatuhan regulasi, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi) mempunyai kontribusi sebesar 88,9% terhadap variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja), dan sisanya sebesar 11,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diluar penelitian.

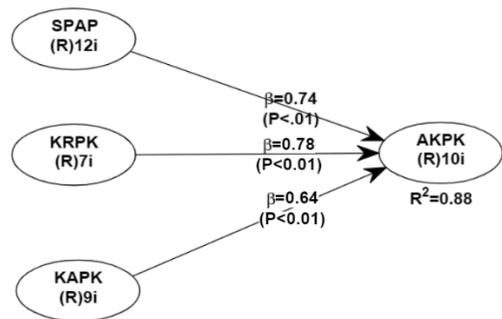
**Tabel 4.** Model Fit (Kualitas Model)

Indikator indikator	Nilai	Syarat (Kock, 2018)	Kesimpulan
Average path coefficient (APC)	0,341, $P < 0,001$	P sig	Diterima
Average R-squared (ARS)	0,260, $P < 0,001$	P sig	Diterima
Average adjusted R-squared (AARS)	0,317, $P < 0,001$	P sig	Diterima
Average block VIF (AVIF)	2,289	Diterima jika $\leq 5$ , Ideal jika $\leq 3,3$	Ideal
Average full collinearity VIF (AFVIF)	3,814	Diterima jika $\leq 5$ , Ideal jika $\leq 3,3$	Ideal
Tenenhous Gof (GoF)	0,419	Lemah $\geq 0,1$ , Sedang $\geq 0,25$ , Kuat $\geq 0,36$	Model Kuat

Penelitian ini memiliki 3 hipotesis, dari hasil analisis statistik dengan menggunakan Warp-PLS 7.0 menunjukkan bahwa semua hipotesis penelitian terdukung. Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan menyatakan bahwa kepatuhan regulasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. pelaksanaan penerapan akuntabilitas haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai seperti penerapan *reward system* dan *punishment* secara konsisten dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan perundangan diciptakan untuk menjaga agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, karena itu perlu dilakukan pengawasan guna memastikan ketaatan

terhadap peraturan yang telah dibuat betul-betul dilaksanakan, dan dilakukan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini berlaku bahwa semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundangan maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dihasilkannya.

**Gambar 1.** Hasil Analisis Jalur



Hipotesis kedua menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah aparat pemerintah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparatur instansi akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran aparatur instansi sehingga dapat mengurangi senjangan anggaran pada instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan membuat ketidakpuasan dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi [18].

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan dan reliabilitas data keuangan. Ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah kepada masyarakat, merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan [19].

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan regulasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja
3. Sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, beberapa butir pertanyaan pada instrumen penelitian (kuesioner) menggunakan konsep-konsep yang digunakan secara umum sehingga mempengaruhi kualitas instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data. Disarankan penelitian selanjutnya perlu memperhatikan spesifikasi dan kualitas instrumen pengumpulan data agar dapat lebih mencerminkan organisasi yang sedang disoroti. Kemudian, hasil kuesioner dibuat berdasarkan persepsi responden sehingga sulit untuk mengontrol bias dari jawaban responden, diperlukan wawancara untuk memperoleh data yang lebih akurat, dan mengkonfirmasi jawaban dari responden.

## Daftar Pustaka

- [1] B. W. Arifin, "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol. 13, no. 1, pp. 15–27, 2012.
- [2] A. R. Yulianto and O. Muthaher, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati" *Tirtayasa Ekonomika*, vol. 14, no. 2, pp. 204–209, 2019.
- [3] H. Fuadah and H. Setiyawati, "The Effect Of The Implementation Of Transparency And Accounting Information Systems On The Quality Of Financial Reports" *International Journal of Business Management*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2020.
- [4] A. P. Laksana and B. D. Handayani, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang," *Accounting Analysis Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 177–186, 2014, [Online]. Available: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- [5] I. Kenis, "Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performances," *The Accounting Review*, vol. 54, no. 4, pp. 707–721, Oct. 1979.
- [6] H. G. Mulya and E. Fauzihardani, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, vol. 4, no. 1, pp. 192–212, 2022, [Online]. Available: <http://jea.ppi.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- [7] D. R. Gunawan and F. Ekonomi, "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)," *Jurnal Akuntansi - Akrua*, vol. 8, no. 1, pp. 72–102, 2016, [Online]. Available: <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>
- [8] Mardiasmo, "Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 6, no. 1, pp. 63–82, 2002.
- [9] Darwanis and S. Chairunnisa, "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," *Jurnal Telaah dan Riset*

- Akuntansi*, vol. 6, no. 2, pp. 150–174, 2013.
- [10] N. N. Afiah and P. C. Azwari, “The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in South Sumatera,” *Procedia Soc Behav Sci*, vol. 211, pp. 811–818, Nov. 2015, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.172.
- [11] M. Hafiz, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar),” *JOM Fekon*, vol. 4, no. 1, pp. 528–542, 2017.
- [12] R. Pakpahan, E. Murwaningsari, and S. Mayangsari, “Influence Of Internal Control System Weaknesses And Audit Quality On The Quality Of Local Government Financial Reports In Indonesia With Good Government Governance As Moderating,” *International Journal of Science*, vol. 3, no. 2, pp. 461–474, 2022, [Online]. Available: <http://ijstm.inarah.co.id>
- [13] J. Doyle *et al.*, “Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting \*,” 2006.
- [14] G. Dian Fitria and Amilin, “Peran Integritas Personal sebagai Pemediasi pada Pengaruh Lingkungan Etika Organisasi, Kualitas Pengendalian Internal dan Keadilan Organisasi terhadap Terjadinya Fraud,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, vol. 1, no. 1, pp. 109–119, Jun. 2014.
- [15] N. Kock and P. Hadaya, “Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods,” *Information Systems Journal*, vol. 28, no. 1, pp. 227–261, 2018.
- [16] M. Sholihin, R. Pike, M. Mangena, and J. Li, “Goal-setting participation and goal commitment: Examining the mediating roles of procedural fairness and interpersonal trust in a UK financial services organisation,” *British Accounting Review*, vol. 43, no. 2, pp. 135–146, Jun. 2011, doi: 10.1016/j.bar.2011.02.003.
- [17] Josep. F. Hair, W. C. Black, B. J. Babin, and R. E. Anderson, *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2014.
- [18] V. K. Chong and R. Strauss, “Participative Budgeting: The Effects Of Budget Emphasis, Information Asymmetry And Procedural Justice On Slack-Additional Evidence” *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, vol. 12, no. 1, 2017.
- [19] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, *Internal Control-Integrated Framework Executive Summary*. Durham: North Carolina., 2013.